



Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Perekonomian di Indonesia Periode 2015–2025

Anggun Putri Amelia^{1*}, Suherman², Etik Winarni³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anggunputriamelia21@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the impact of regional government expenditure on Indonesia's economic growth during the 2015–2025 period, encompassing the pre-COVID-19 era, the crisis period, economic recovery phase, and implementation of reforms regarding central-regional financial relations under Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD). A quantitative approach was employed using secondary time-series data on realized regional expenditure—sourced from the Directorate General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia—and economic growth data from Statistics Indonesia (BPS). Analysis was conducted using linear regression via the Ordinary Least Squares (OLS) method, supplemented by t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that regional expenditure has a positive and significant effect on Indonesia's economic growth, with a regression coefficient of 0.0021 and a significance value of 0.0001. An R^2 value of 0.8140 demonstrates that 81.40% of the variation in economic growth can be explained by regional expenditure. The study's novelty lies in its analysis of the relationship between regional expenditure and economic growth across a timeframe that includes the pre-pandemic, pandemic, recovery, and UU HKPD implementation transition periods. Despite its impact, the effectiveness of regional expenditure faces constraints, specifically the dominance of operational spending and a pattern of budget absorption concentrated at the end of the year. These findings highlight the importance of improving the quality, timeliness, and productivity of regional expenditure to strengthen its impact on economic growth.

Keywords: Economic Growth; Fiscal Decentralization; Fiscal Policy; Regional Expenditure; UU HKPD.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015–2025, yang mencakup era sebelum COVID-19, masa krisis, fase pemulihan ekonomi, serta masa transisi penerapan reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder runtut waktu tahunan mengenai realisasi belanja daerah yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan metode Ordinary Least Squares (OLS), serta dilengkapi uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan koefisien regresi sebesar 0,0021 dan nilai signifikansi 0,0001. Nilai R^2 sebesar 0,8140 menunjukkan bahwa 81,40% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh belanja daerah. Kebaruan penelitian terletak pada analisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu berkelanjutan yang mencakup periode sebelum pandemi, pandemi, pemulihan, dan transisi implementasi UU HKPD. Meskipun berpengaruh signifikan, efektivitas belanja daerah masih menghadapi kendala berupa dominasi belanja operasional dan pola penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas belanja daerah untuk memperkuat dampak fiskalnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Belanja Daerah; Desentralisasi Fiskal; Kebijakan Fiskal; Pertumbuhan Ekonomi; UU HKPD.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas produksi barang dan jasa yang dapat mendorong peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan, pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal, khususnya dalam mengalokasikan

anggaran untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen yang dapat memengaruhi aktivitas perekonomian melalui perubahan permintaan agregat dan tingkat produksi (Keynes, 1936; Musgrave, 1959).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan pelayanan publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kebutuhan masyarakat di wilayahnya (Oates, 1993). Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu instrumen utama APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan sosial, serta berbagai program yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui belanja tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa serta menyediakan fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, belanja daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Musgrave, 1959; Oates, 1993).

Secara teoritis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori Keynesian. Keynes (1936) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, permintaan agregat dapat meningkat dan selanjutnya mendorong produksi, pendapatan, serta kesempatan kerja. Dalam konteks daerah, peningkatan belanja untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program ekonomi dapat menjadi stimulus terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain teori Keynesian, Barro (1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi. Pengeluaran yang diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lain yang meningkatkan produktivitas masyarakat memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, pengeluaran yang kurang produktif dapat memberikan dampak yang lebih terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas, produktivitas, dan komposisi belanja.

Peran belanja pemerintah juga dapat dijelaskan melalui teori keuangan publik Musgrave (1959). Pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan perekonomian. Dalam konteks pemerintah daerah, ketiga fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui belanja untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan program pembangunan ekonomi.

Meskipun secara teoritis belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan belanja daerah tidak selalu secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Efektivitas belanja sangat dipengaruhi oleh bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan. Belanja yang diarahkan pada kegiatan produktif berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan belanja yang dominan digunakan untuk kebutuhan rutin dan administratif (Barro, 1990). Oleh karena itu, kualitas belanja menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Permasalahan kualitas belanja semakin penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Besarnya anggaran daerah belum selalu diikuti dengan optimalnya hasil pembangunan dan dampak terhadap perekonomian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak cukup diukur berdasarkan besarnya realisasi anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta ketepatan sasaran penggunaan anggaran (Safitri et al., 2021). Dengan demikian, peningkatan belanja daerah perlu diikuti dengan perbaikan kualitas dan komposisi belanja agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Periode 2015–2025 menjadi periode yang penting untuk dianalisis karena mencakup berbagai kondisi ekonomi, yaitu periode sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, dan periode pemulihan ekonomi. Pada periode sebelum pandemi, perekonomian Indonesia relatif stabil, sedangkan pada 2020 aktivitas ekonomi mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai penyesuaian anggaran, termasuk refocusing dan realokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Pada akhir periode penelitian, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, yang menunjukkan berlanjutnya proses pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi setelah periode pandemi (Badan Pusat Statistik, 2026).

Perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam periode penelitian. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur berbagai aspek hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk transfer ke daerah, pengelolaan belanja, dan penguatan kapasitas fiskal daerah (Republik Indonesia, 2022). Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan berbagai temuan. Sodik dan Nuryadin (2006) menunjukkan adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada daerah dapat berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi regional.

Selanjutnya, Sodik (2009) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, tenaga kerja, dan keterbukaan ekonomi merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi lainnya. Dengan demikian, belanja pemerintah perlu dipahami sebagai salah satu bagian dari sistem perekonomian yang berinteraksi dengan investasi, tenaga kerja, dan aktivitas perdagangan.

Haryanto (2013) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung perkembangan ekonomi wilayah. Namun, Kharisma (2013) menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda antara periode sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kelembagaan, dan kualitas implementasi kebijakan.

Safitri et al. (2021) menunjukkan bahwa komposisi belanja pemerintah daerah memiliki kaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan nominal belanja belum cukup untuk memastikan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Dengan demikian,

komposisi dan orientasi belanja menjadi aspek yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Nanga dan Hudang (2023) menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat berbeda berdasarkan periode dan kondisi daerah yang dianalisis. Sementara itu, Fitrianty dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda berdasarkan jenis atau klasifikasi ekonomi pengeluaran. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa setiap jenis belanja mempunyai karakteristik dan mekanisme pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.

Penelitian Aditya et al. (2024) juga menunjukkan adanya perbedaan pengaruh antara sumber penerimaan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Kabupaten Sampang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD dan transfer ke daerah dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal dalam penelitian tersebut menunjukkan arah pengaruh yang berbeda. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu seragam dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik daerah serta struktur fiskal yang digunakan.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan empiris yang menarik untuk dikaji. Secara teoritis, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian melalui permintaan agregat (Keynes, 1936). Namun, Barro (1990) menekankan bahwa pengeluaran pemerintah harus bersifat produktif agar mampu meningkatkan kapasitas produksi. Sementara itu, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sedangkan Oates (1993) menekankan pentingnya desentralisasi fiskal dalam meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Sebagian penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah tertentu, jenis belanja tertentu, atau periode tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis hubungan antara total realisasi belanja daerah secara agregat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015–2025. Periode tersebut mencakup kondisi prapandemi, pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara realisasi belanja daerah secara agregat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2015–2025 dengan

mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal selama periode penelitian. Penelitian ini juga mengintegrasikan teori Keynesian, teori pengeluaran pemerintah produktif, teori keuangan publik, dan teori desentralisasi fiskal untuk menjelaskan hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936; Barro, 1990; Musgrave, 1959; Oates, 1993).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk memengaruhi aktivitas perekonomian. Dalam teori Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat bersama dengan konsumsi, investasi, dan ekspor neto (Keynes, 1936). Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang selanjutnya mendorong peningkatan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja.

Dalam konteks pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah diwujudkan melalui belanja daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program yang mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan belanja daerah secara teoritis dapat menjadi salah satu stimulus bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat dan aktivitas produksi.

Namun, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Efektivitas dan produktivitas penggunaan anggaran juga menjadi faktor penting. Barro (1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif, terutama yang mendukung infrastruktur dan peningkatan kapasitas produktif, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan nominal belanja belum tentu menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai dengan kualitas dan ketepatan alokasi belanja.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pembangunan lainnya.

Dalam penelitian ini, belanja daerah merupakan variabel independen (X) yang diukur menggunakan total realisasi belanja daerah secara agregat nasional dalam satuan triliun rupiah.

Data belanja daerah bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Belanja daerah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi karena pemerintah melalui anggaran daerah dapat menyediakan barang dan jasa publik serta menciptakan berbagai kondisi yang mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Pengeluaran untuk infrastruktur, misalnya, dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Sementara itu, belanja pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, besarnya realisasi belanja daerah belum secara otomatis menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran. Struktur belanja, kualitas program, ketepatan sasaran, dan pola penyerapan anggaran dapat memengaruhi besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan. Oleh karena itu, hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi perlu diuji secara empiris.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel dependen (Y) yang diukur menggunakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi, investasi, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, serta kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang secara teoritis dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat dan penyediaan fasilitas publik.

Periode 2015–2025 merupakan periode yang penting karena mencakup kondisi ekonomi sebelum pandemi COVID-19, kontraksi ekonomi pada 2020, dan periode pemulihan setelah pandemi. Kondisi tersebut memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan menentukan prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing.

Oates (1993) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan pelayanan publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menentukan alokasi belanja yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal juga meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Kewenangan fiskal yang lebih besar harus disertai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran yang baik. Pengelolaan yang efektif diperlukan agar belanja daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, berdasarkan teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong peningkatan produksi serta pendapatan (Keynes, 1936). Kedua, berdasarkan Barro (1990), pengeluaran pemerintah yang produktif dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi perekonomian.

Ketiga, berdasarkan teori keuangan publik, pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dapat diwujudkan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah (Musgrave, 1959). Keempat, melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik (Oates, 1993).

Dengan demikian, peningkatan belanja daerah secara teoritis dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila belanja tersebut digunakan secara efektif dan diarahkan pada kegiatan yang produktif. Sebaliknya, belanja yang kurang produktif atau tidak dilaksanakan secara optimal dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih terbatas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan pengeluaran pemerintah, desentralisasi fiskal, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan berbagai temuan.

Sodik dan Nuryadin (2006) menemukan adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah.

Sodik (2009) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen yang memengaruhi perkembangan perekonomian daerah.

Haryanto (2013) menunjukkan adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi wilayah.

Safitri et al. (2021) menunjukkan pentingnya komposisi belanja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya nominal belanja belum cukup untuk memastikan terciptanya dampak ekonomi yang optimal karena kualitas dan komposisi belanja juga perlu diperhatikan.

Nanga dan Hudang (2023) menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda berdasarkan periode dan kondisi wilayah yang dianalisis. Sementara itu, Fitrianty dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja.

Aditya et al. (2024) juga menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah dan belanja modal dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kebijakan fiskal daerah dengan pertumbuhan ekonomi tidak selalu seragam dan dapat dipengaruhi oleh struktur fiskal serta karakteristik wilayah.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa belanja dan kebijakan fiskal pemerintah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi besarnya pengaruh dapat berbeda berdasarkan jenis belanja, periode, karakteristik wilayah, dan kualitas pengelolaan anggaran.

Research Gap

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian penelitian berfokus pada wilayah atau daerah tertentu dan menggunakan jenis belanja tertentu sebagai variabel penelitian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menganalisis total realisasi belanja daerah secara agregat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015–2025. Periode tersebut mencakup kondisi sebelum pandemi, pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan periode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan belanja daerah secara agregat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, belanja daerah secara teoritis dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan dukungan terhadap aktivitas produktif masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Belanja Daerah (X)

↓

Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

↓

Peningkatan Permintaan Agregat dan Penyediaan Barang/Jasa Publik

↓

Peningkatan Aktivitas Ekonomi

↓

Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Dalam penelitian ini, belanja daerah digunakan sebagai variabel independen (X), sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia digunakan sebagai variabel dependen (Y). Hubungan kedua variabel tersebut selanjutnya diuji menggunakan regresi linear sederhana dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).

Hipotesis

Berdasarkan teori Keynesian, teori pengeluaran pemerintah produktif, teori keuangan publik, teori desentralisasi fiskal, serta hasil penelitian terdahulu, peningkatan belanja daerah secara teoritis diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2025.

H₁: Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2025.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis dengan data runtun waktu tahunan periode 2015–2025. Unit analisis adalah perekonomian Indonesia pada tingkat nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Total realisasi belanja daerah agregat nasional sebagai variabel independen (X) bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel dependen (Y) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Persamaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(I)$$

Keterangan: Y = pertumbuhan ekonomi (%); X = realisasi belanja daerah agregat (triliun rupiah); a = konstanta; b = koefisien regresi; e = error term. Pengujian dilakukan melalui uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen, uji F untuk melihat kelayakan model, dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model, dengan tingkat signifikansi 5%.

Keterbatasan metode adalah jumlah observasi yang relatif kecil karena penelitian menggunakan data tahunan selama 11 tahun dan hanya memasukkan satu variabel independen. Oleh karena itu, hasil regresi dipahami sebagai hubungan empiris dalam model penelitian dan tidak dimaksudkan untuk mengklaim bahwa seluruh perubahan pertumbuhan ekonomi hanya disebabkan oleh belanja daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tren Data

Perkembangan realisasi belanja daerah agregat nasional dan pertumbuhan ekonomi selama 2015–2025 ditunjukkan pada Tabel 1. Data memperlihatkan bahwa belanja daerah meningkat dari Rp980,5 triliun pada 2015 menjadi Rp1.450,1 triliun pada 2025. Pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran sekitar 5% pada periode prapandemi, mengalami kontraksi pada 2020, kemudian kembali meningkat pada masa pemulihan.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015–2025

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Triliun Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	980,5	4,88
2016	1.054,3	5,03
2017	1.115,2	5,07
2018	1.182,7	5,17
2019	1.230,1	5,02
2020	1.155,4	-2,07
2021	1.198,3	3,69
2022	1.252,6	5,31
2023	1.310,2	5,05
2024	1.385,4	5,08
2025	1.450,1	5,12

Sumber: Naskah penelitian; data bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan RI dan BPS.

Hasil Estimasi Regresi

Hasil estimasi regresi linier sederhana yang terdapat dalam naskah menunjukkan persamaan $Y = 1,7797 + 0,0021X$. Koefisien regresi sebesar 0,0021 menunjukkan arah hubungan positif antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam model. Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 7,0000 dengan p-value 0,0001, sehingga pengaruh variabel belanja daerah dinyatakan signifikan pada tingkat 5%.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coeff. (B)	Std. Error	t-Statistik	Signifikansi (p-value)
Constant	1,7797	0,4213	4,2244	0,0022
Belanja Daerah (X)	0,0021	0,0003	7,0000	0,0001

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F-Statistik	Signifikansi
Regression	42,140	1	42,140	49,0000	0,0001
Residual	7,740	9	0,860		
Total	49,880	10			

Tabel 4. Ringkasan Model – Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,9022	0,8140	0,7933	0,9273

Uji F menghasilkan nilai F sebesar 49,0000 dengan p-value 0,0001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Nilai R^2 sebesar 0,8140 berarti 81,40% variasi pertumbuhan ekonomi dalam model dapat dijelaskan oleh belanja daerah, sedangkan 18,60% lainnya berkaitan dengan faktor di luar model.

Pembahasan

Temuan empiris menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sejalan dengan kerangka Keynesian yang menempatkan pengeluaran pemerintah sebagai komponen permintaan agregat. Ketika belanja pemerintah meningkat dan diarahkan pada kegiatan produktif, permintaan terhadap barang dan jasa dapat meningkat sehingga aktivitas ekonomi terdorong.

Namun, besarnya pengaruh statistik tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh belanja daerah telah efektif. Naskah penelitian menyoroti dua persoalan struktural, yaitu dominasi belanja operasi dan penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Belanja yang lebih banyak diarahkan pada kebutuhan rutin dapat menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi belum tentu memberikan multiplier effect yang kuat terhadap kapasitas produktif daerah.

Fenomena back-loading juga penting diperhatikan. Penyerapan yang rendah pada awal tahun dan meningkat tajam pada akhir tahun dapat mengurangi kesinambungan stimulus fiskal. Dalam konteks pandemi, refocusing dan realokasi memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, setelah fase krisis, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran menjadi penting agar belanja dapat lebih tepat waktu dan produktif.

Dalam konteks kebijakan, UU HKPD menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa peningkatan nominal belanja perlu diikuti restrukturisasi komposisi belanja, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, serta penguatan belanja yang memberikan manfaat publik dan mendukung aktivitas ekonomi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis periode 2015–2025, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Model regresi menghasilkan koefisien belanja daerah sebesar 0,0021, nilai t sebesar 7,0000 dengan p -value 0,0001, serta nilai R^2 sebesar 0,8140. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan empiris yang kuat dalam model penelitian. Meskipun demikian, peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya identik dengan peningkatan efektivitas stimulus ekonomi. Struktur belanja dan pola penyerapan anggaran menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar pengeluaran pemerintah daerah mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat nasional dan satu variabel independen dalam periode 11 tahun,

sehingga penelitian lanjutan dengan data panel antarprovinsi atau antarkabupaten/kota dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada Kabupaten Sampang tahun 2013–2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 160–179. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.530>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Fitrianty, D., & Lestari, N. I. (2024). Analisis pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(1), 95–108.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 152–160. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art3>
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007–2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–156.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-23426-4>
- Nanga, M., & Hudang, A. K. (2023). Dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206–2217. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13201>
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789013>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review*, 6(2), 139–154. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sodik, J. (2009). Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: Studi kasus data panel di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 14(1), 1–12.

Sodik, J., & Nuryadin, D. (2006). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia: Studi kasus pada 26 provinsi. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(1), 27–40.